

# Pembingkajian Berita Demo 24 September di Harian Kompas, The Jakarta Post dan Media Indonesia

Farren Anatje, Chory Angela & Agusly Aritonang,

Prodi Ilmu Komunikasi, Universitas Kristen Petra Surabaya

*farren.anatje@gmail.com*

## Abstrak

Pada 24 September 2019, terjadi demonstrasi ribuan mahasiswa di berbagai kota di Indonesia. Demonstrasi ini disebabkan oleh pengesahan RUU no. 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menyerukan pengurangan status independen KPK. Demonstrasi mengundang perhatian media sosial maupun media konvensional. Beberapa surat kabar nasional seperti Kompas, Media Indonesia dan The Jakarta Post memberitakan peristiwa ini dengan sudut pandang yang berbeda.

Jenis penelitian ini adalah deksriptif dengan menggunakan metode analisis framing menurut Zhongdan Pan dan Gerald M. Kosicki. Metode ini menggunakan empat elemen penelitian yaitu sintaksis, skrip, tematik dan retorik. Hasil penelitian ini menunjukkan ideologi dan relasi kepemilikan media mempengaruhi pemberitaan demo 24 September di Harian Kompas bahwa demo bisa diselesaikan dengan dialog, di The Jakarta Post bahwa demo terlihat seperti demo jatuhnya rezim Soeharto dan di Media Indonesia bahwa demonstrasi tidak relevan untuk dilakukan lagi.

**Kata Kunci:** Pembingkajian, Demo 24 September, Pan dan Kosicki

## Pendahuluan

Pada 17 September 2019 Revisi Undang-Undang no. 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (RUU KPK) disahkan oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang menjabat pada masa jabatan 2014-2019. RUU ini disahkan karena tidak ada satu partai pun yang menolak. Seluruh partai politik, baik yang pada Pilpres 2019 mengukung Jokowi Widodo-Ma'aruf Amin maupun Prabowo Subianto-Sandiaga Uno kompak menyepakati revisi UU KPK di DPR ([www.kompas.com](http://www.kompas.com)). Revisi ini menyerukan untuk mengurangi status independen KPK dengan menjadikannya badan pemerintah, membentuk dewan pengawas untuk memantau kerja KPK, serta mengharuskan para penyelidik KPK untuk mendapatkan izin resmi untuk melakukan penyadapan. Revisi ini banyak dikecam oleh para aktivis dan pakar karena mengurangi keefektifan KPK. Menurut jajak pendapat yang dilakukan Tempo pada 16 September 2019, 82,61% publik menentang revisi tersebut dan mendesak Presiden Joko Widodo untuk menolak RUU tersebut. Hal ini jugalah yang membuat munculnya beberapa petisi di *change.org* seperti "Indonesia Bersih, Presiden Tolak Revisi UU KPK!" yang

sudah ditandatangani oleh 520,275 orang dan “JANGAN BUNUH KPK, HENTIKAN REVISI UU KPK” yang sudah ditandatangani oleh 62,483 orang.

Korupsi memang merupakan permasalahan yang signifikan di Indonesia, dan KPK, yang didirikan pada tahun 2002 adalah bagian dari tuntutan reformasi yang mengikuti penggulingan rezim Soeharto yang terkenal otoriter dan marak akan korupsi (*aljazeera.com*).

Selain pengecaman oleh aktivis dan pakar serta munculnya petisi, pengurangan efektivitas kerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ini juga membuat demo mahasiswa terjadi di banyak kota di Indonesia. Dan tak tanggung-tanggung, demo ini berlangsung sampai 1 Oktober 2019, ketika sidang parlemen terakhir diadakan (*www.tirto.id*). Demonstrasi ini diikuti oleh ribuan mahasiswa baik di Jakarta, Jogja, Bandung, Malang, Balikpapan, Samarinda, Purwokerto dan lainnya.

Di Jakarta sendiri demonstrasi diikuti oleh Universitas Indonesia, UIN Jakarta, Universitas Al-Azhar, Universitas Kristen Indonesia dan beberapa kampus lain. Selain mengecam revisi UU KPK, demonstrasi yang dilakukan didepan Gedung MPR/DPR ini juga menolak pengesahan RUU KUHP, RUU Pertahanan, RUU Minerba, RUU Ketenagakerjaan, serta RUU Sumber Daya Air (*www.tirto.id*).

Demonstrasi yang dilakukan pada 24 September ini mengundang perhatian baik di media sosial maupun di media konvensional. Di media sosial twitter misalnya, tagar #GejayanMemanggil menjadi pemicu mahasiswa turun kejalan. #GejayanMemanggil sendiri merupakan demo yang dilaksanakan di Jalan Gejayan (23/09/19). Demo ini diadakan di lokasi tempat terjadinya Tragedi Gejayan (8/5/98) yang dipicu oleh keterangan pers Wiranto yang memerintah seluruh jajaran ABRI – sekarang TNI – untuk menghentikan aksi anarkis mahasiswa yang melakukan aksi-aksi protes yang terjadi di berbagai daerah menuntut percepatan reformasi dengan meminta Soeharto lengser (*www.tirto.id*). Saat itu, Wiranto menjabat sebagai Menteri Pertahanan dan Keamanan sekaligus Panglima ABRI di Markas Besar. Insiden ini menewaskan Moses Gatotkaca, mahasiswa Sanata Dharma Yogyakarta.

Esoknya (24/09/19), tagar #MahasiswaBergerak berkumandang saat unjuk rasa dilakukan di depan gedung DPR saat rapat paripurna berlangsung. Demo ini digelar bertepatan dengan 20 tahun Tragedi Semanggi II – peristiwa penembakan demonstran oleh tentara akibat keputusan DPR mengesahkan UU PKB (Penanggulangan Keadaan Bahaya) (*www.tirto.id*).

Drone Emprit, sebuah sistem karya Ismail Fahmi yang berfungsi untuk memonitor serta menganalisa media sosial dan *platform online* yang berbasis teknologi big data (*goodnewsfromindonesia.id*) mencatat bahwa dari satu *tweet* terdapat 7, 63 interaksi (berupa *retweet* dan *reply*). Hasil analisa serupa juga diungkap Rustika Herlambang, Direktur Komunikasi Indonesia Indikator, yakni cuitan dari akun manusia lebih besar dari akun robot. Akun manusia sebesar 142.377 (95,7%) dan akun robot 6.367 (4,3%) (*cnnindonesia.com*). Ini artinya, tagar yang menjadi

*trending topic* tersebut bukan merupakan sebuah manipulasi untuk kepentingan suatu pihak, melainkan merupakan aksi solidaritas organik.

Bahkan pemberitaan demonstrasi ini menjadi pembahasan beberapa surat kabar nasional seperti Kompas, Media Indonesia maupun koran berbahasa Inggris Indonesia, The Jakarta Post. Isu pemberitaan memang memiliki objek yang sama yakni demonstrasi 24 September yang dilakukan oleh mahasiswa. Namun, pemberitaan yang muncul disetiap media memiliki perbedaan sudut pandang (*angle*) isi beritanya. Perbedaan itu bisa dilihat dari gaya bahasa penulisan berita, judul, foto, narasumber dan penempatan berita tersebut.

Seperti sehari setelah demo terjadi (25/11/19), Harian Kompas, The Jakarta Post maupun Media Indonesia meletakkan berita demonstrasi ini menjadi *headline* mereka. Koran Kompas memberi judul “Suara Mahasiswa Didengar” dengan foto pengunjuk rasa yang menghindari tembakan gas air mata oleh polisi di depan Gedung DPR, Senayan, Jakarta. Demo 24 September juga dibahas pada edisi 26 September dengan judul “Hadapi dengan Proporsional” dengan memuat foto salah satu pelajar yang menyalami polisi yang menjaga unjuk rasa di belakang Kompleks Parlemen.

Di sisi lain, The Jakarta Post mengangkat judul “Students lead the way, again” dan membahas bagaimana demo ini terlihat sama dengan demo yang terjadi lebih dari dua dekade sebelumnya, yakni Tragedi Semanggi 1998 dengan memuat 4 foto mengenai suasana demo tersebut. Besoknya (26/09/2019), The Jakarta Post memilih judul “Students, journalists slam police use of force” dan menyertakan foto polisi yang mencoba menghadang pendemo yang mulai ricuh. Edisi ini membahas mengenai korban luka dan berjatuh akibat demo yang dilakukan.

Sedangkan Media Indonesia memberi judul *headline* “Demonstrasi tidak Relevan Lagi” pada edisi 25 September mereka dan memuat foto Ketua DPR Bambang Soesatyo dan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menerima berkas tanggapan pemerintah dari Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly saat Rapat Paripurna ke-10 DPR Masa Persidangan I Tahun Sidang 2019-2020 di kompleks gedung parlemen Senayan, Jakarta.

Dan ntuk edisi 26 September, Media Indonesia memberi judul “RKUHP Dikaji Mendalam Lagi” dengan memuat foto calon penumpang kereta api listrik (KRL) Commuter Line memanjat pagar pembatas untuk memasuki Stasiun Palmerah. Stasiun ini memang berdekatan dengan bagian belakang gedung MPR/DPR sehingga turut merasakan imbas dari demo yang terjadi.

Ketiga media ini memiliki perbedaan dalam menuliskan berita mengenai demo 24 September 2019 dalam dua edisi mereka, yakni edisi 25 September dan 26 September 2019. Perbedaan tersebut bisa dilihat dari adanya perbedaan judul, dan foto yang dimuat baik di Harian Kompas, The Jakarta Post dan Media Indonesia. Adanya pandangan berbeda di ketiga media nasional ini tidak terlepas dari unsur kepemilikan, keberpihakan juga ideologi media tersebut. Dan hal ini terus

berlanjut sampai 01 Oktober 2019 – ketika demo mahasiswa berakhir saat sidang parlemen terakhir diadakan.

Netralitas media memang tidak semudah dibayangkan oleh para pembaca karena salah satu pengaruh hal ini adalah unsur kepemilikan dalam media tersebut. “Jadi, kepemilikan media sendiri akan berpengaruh besar terhadap kebebasan pers (Kansong, 2009, p. 24).

Bahkan menurut penelitian skripsi Johanes (2013) yang berjudul “Analisis *framing* pemberitaan konflik partai Nasional Demokrat (NASDEM) di harian media Indonesia dan koran Sindo menyimpulkan bahwa “unsur kepemilikan media memberikan pengaruh pada penulisan berita”. Kharisma (2018) juga menyimpulkan dalam prosidingnya yang berjudul “Pembingkai Berita Kericuhan Aksi Demonstrasi pada Peringatan 20 Tahun Reformasi di Media Daring” bahwa dalam memproduksi berita, ada hal lain yang turut andil seperti kerja, rutinitas, dan skema wartawan dalam memaknai suatu peristiwa.

Oleh sebab itu, penting untuk mengetahui *frame* pemberitaan demo 24 September 2019 untuk melihat ideologi ketiga media yang diperlihatkan lewat cara wartawan menekan dan menonjolkan aspek tertentu (Eriyanto, 2007, p. 122) agar masyarakat tidak buta ataupun lupa akan realitas yang sebenarnya.

Karena sebagai masyarakat awam, gagasan bahwa ketika kita sedang membaca sebuah peristiwa di sebuah media aberarti kita sedang membaca berita dari sebuah “jendela” adalah benar. Masing-masing orang memiliki dan memilih jendelanya masing-masing. Tetapi belum tentu masing-masing jendela tersebut bisa memperlihatkan sebuah realitas yang sesungguhnya. Bisa saja terjadi bias pemberitaan yang tidak diketahui pembaca (Eriyanto, 2007, p. 4)

Maka dari fenomena diatas peneliti mengangkat rumusan masalah “Bagaimana pergerakan pembingkai berita demo 24 September 2019 di Harian Kompas, The Jakarta Post dan Media Indonesia?”

## Tinjauan Pustaka

### Proses Produksi Berita

Fakta-fakta dalam sebuah peristiwa dirangkum dalam berita yang sampai kepada pembaca surat kabar akan melalui tahapan produksi. Ada empat tahapan proses produksi berita, dan berikut akan dibahas penjabarannya masing-masing (Eriyanto, 2007, p. 100).

Tahapan pertama adalah rutinitas organisasi, Ada banyak faktor yang menentukan kenapa peristiwa tertentu dapat diliput sebagai berita sementara peristiwa lainnya tidak. Aspek tertentu dari peristiwa tersebut ditonjolkan sementara aspek yang lainnya tidak, atau secara sengaja dihilangkan. Proses inilah yang setiap harinya dilakukan institusi media secara teratur dalam memproduksi berita.

Dalam rutinitas organisasi, wartawan juga meliput dan menuliskan berita hingga sampai pada tahap editing yang merupakan tahapan akhir dalam sebuah kegiatan rutin awak media yakni tahap *editing*. Di tahap inilah wartawan dan editor akan memberikan batasan agar jangan sampai setiap sebuah berita melebihi dari apa yang ingin diketahui pembaca ataupun berita yang ingin dibaca pembaca tetapi tidak dituliskan oleh para wartawan dan editor. Proses *editing* juga akan menentukan berita mana yang perlu untuk diberikan judul besar dan dimuat dihalaman muka, tulisan mana yang perlu dipotong, dan cerita mana yang perlu diubah (Ishwara, 2005, p. 92).

Tahapan selanjutnya adalah menentukan nilai berita, karena semua peristiwa tidak lantas disebut sebagai berita, tetapi harus dinilai memenuhi kriteria berita. Hal inilah yang merupakan prosedur pertama bagaimana peristiwa dikonstruksi. Dan Tahapan terakhir dalam proses produksi berita adalah ideologi profesional/objektivitas. Kalau nilai berita berhubungan dengan prosedur apa yang bisa disajikan oleh media kepada khalayak, maka standar profesional berhubungan dengan jaminan yang ditekankan kepada khalayak bahwa apa yang disajikan adalah suatu kebenaran. Yang hendak kita lakukan adalah mencari tahu bagaimana cerita dibingkai, bagaimana memahami dari sudut media itu sendiri, serta abgaiaman kerangka pemikiran yang dikembangkan oleh media.

### **Teori Konstruksi Sosial**

Analisis *framing* termasuk kedalam paradigma konstruksionis, dimana paradigma ini mempunyai posisi dan pandangan tersendiri terhadap media dan teks berita yang dihasilkannya. (Eriyanto, 2007, p. 13). Konsep mengenai konstruksionisme diperkenalkan oleh Peter L. Berger – karena menurut dia, realitas itu tidak dibentuk secara ilmiah, tidak juga sesuatu yang diturunkan oleh Tuhan. Tetapi sebaliknya, ia dibentuk dan dikonstruksi. (Eriyanto, 2007, p. 15). Dengan kata lain, realitas berwajah ganda/plural. Setiap orang bisa mempunyai konstruksi yang berbeda-beda atas suatu realitas karena masing-masing orang mempunyai pengalaman, preferensi, pendidikan tertentu, dan lingkungan sosial dengan konstruksinya masing-masing.

Dan jika dilihat implementasinya di media, paradigma ini mempunyai beberapa penilaiannya sendiri yakni fakta/peristiwa adalah hasil konstruksi karena realitas bersifat subjektif dan tercipta lewat konstruksi, sudut pandang tertentu dari wartawan. (Eriyanto, 2007, p. 19). Karena hal inilah, berita bersifat subjektif dan merupakan konstruksi atas realitas (Eriyanto, 2007, p. 27). Selain itu, paradigma ini juga menilai media sebagai agen konstruksi. Media bukanlah sekedar saluran yang bebas tetapi juga mengkonstruksi realitas, lengkap dengan pandangan, bias dan pemihakannya (Eriyanto, 2007, p. 23). Paradigma ini juga menilai bahwa berita bukan refleksi dari realitas. Ia hanya konstruksi dari realitas karena berita adalah hasil dari konstruksi sosial dimana selalu melibatkan pandangan, ideologi dan nilai-nilai dari wartawan atau media. (Eriyanto, 2007, p. 25).

## Framing

Framing adalah pendekatan yang dilakukan untuk melihat bagaimana realitas dibentuk dan dikonstruksi oleh media. Hasil akhir dari proses pembentukan konstruksi realitas tersebutlah yang memuat bagian tertentu dari realitas yang lebih menonjol dan lebih mudah dikenal. *Framing* mempunyai dua makna, *pertama* merujuk pada cara sebuah isi berita yang dibentuk secara khusus dan dikontekstualisasikan oleh jurnalis dalam bingkai yang lazim dari referensi dan berdasarkan pada struktur yang laten dari makna. *Kedua*, berhubungan dengan memusatkan perhatian pada efek *framing* pada publik (McQuail, 2000, p. 495).

Jadi, analisis *framing* dipakai untuk melihat bagaimana media mengkonstruksikan realitas. Analisis *framing* juga dipakai untuk melihat bagaimana peristiwa dipahami dan dibingkai oleh media. Dalam analisis *framing* terdapat dua esensi utama. Pertama adalah bagaimana peristiwa dimaknai. Hal ini berhubungan dengan bagian mana yang diliput dan mana yang tidak diliput. Kedua, bagaimana fakta itu ditulis. Aspek ini berhubungan dengan pemakaian kata, kalimat, dan gambar untuk mendukung gagasan. (Eriyanto, 2007, p. 10).

### Model Analisis Framing Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki

Dalam melakukan penelitian ini peneliti menggunakan model analisis framing paling populer dan banyak digunakan untuk penelitian, yakni model analisis Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki. Alasan pemilihan model ini karena Pan dan Kosicki menjabarkan pbingkai berita dalam sebuah model yang sangat detail. *Framing* didefinisikan sebagai proses membuat suatu pesan lebih menonjol, menempatkan informasi lebih daripada yang lain sehingga khalayak lebih tertuju pada pesan tersebut.

Dalam pendekatan Pan dan Kosicki, perangkat framing dibagi dalam empat struktur besar. Pertama adalah struktur sintaksis. Sintaksis berhubungan dengan bagaimana wartawan menyusun peristiwa – pernyataan, opini, kutipan, pengamatan, atas peristiwa – ke dalam bentuk susunan umum berita. Struktur semantik diamati dari began berita (*lead* yang dipakai, latar, *headline*, kutipan yang diambil dan sebagainya). Kedua, struktur skrip. Skrip berhubungan dengan bagaimana wartawan mengisahkan atau menceritakan peristiwa kedalam bentuk berita. Ketiga, struktur tematik. Tematik berhubungan dengan bagaimana wartawan mengungkapkan pandangannya atas peristiwa ke dalam proposisi, kalimat atau hubungan antarkalimat yang membentuk teks secara keseluruhan (Eriyanto, 2007, p. 255).

## Metode

### Konseptualisasi Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti menggunakan metode analisis *framing*. Analisis *framing* termasuk kedalam pandangan konstruksionis. Artinya, setiap berita yang sampai ke pembaca dikonstruksikan oleh media massa.

Model analisis ini menjelaskan bahwa konsep *framing* lebih menekankan pada bagaimana seseorang memproses informasi dalam dirinya. Peneliti juga memilih model Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki karena ke empat struktur perangkat analisis *framing* yakni sintaksis, skrip, tematik dan retorik membentuk suatu tema yang saling berkaitan dalam konstruksi pemberitaan.

### *Subjek Penelitian*

Subjek penelitian ini adalah Harian Kompas, The Jakarta Post, dan Media Indonesia. Peneliti menetapkan berita demo 24 September 2019 edisi 25 September 2019 sampai 01 Oktober 2019 di Harian Kompas, The Jakarta Post, Media Indonesia sebagai objek.

### *Analisis Data*

Data-data yang telah dikumpulkan akan dianalisis oleh peneliti dengan menggunakan model *framing* Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki yaitu sintaksis; cara menyusun fakta, skrip; cara wartawan mengisahkan fakta, tematik; cara wartawan menuliskan fakta, dan retorik; cara wartawan menekankan fakta.

## **Temuan Data**

Dalam pergerakan pembungkaman berita, Harian Kompas serta The Jakarta Post cenderung memuat pemberitaan yang sama. Terlihat edisi 26 September 2019 di kedua media yang membahas mengenai kekerasan yang dilakukan aparat kepada mahasiswa.

Sedangkan di Media Indonesia, edisi 26 September memuat pemberitaan mengenai Perppu yang dimana menurut pernyataan Yasona Laoly selaku Menkumham, Perppu tidak akan dikeluarkan Presiden. Besoknya (26/11/19), Setelah selesai melakukan pertemuan sejumlah tokoh dari berbagai latar belakang profesi, Presiden mempertimbangkan untuk mengeluarkan Perppu untuk mendinginkan suasana. Hal ini diberitakan oleh Harian Kompas dan The Jakarta Post pada edisi 27 September 2019.

Pemberitaan mengenai demo 24 September 2019 hanya dibahas Harian Kompas sampai kepada edisi 27 September. Dan pada The Jakarta Post, pemberitaan tersebut berlanjut sampai kepada pelantikan anggota DPR periode 2019-2024 yakni pada edisi 01 Oktober 2019. Sedangkan Media Indonesia hanya membahas pada edisi 25 dan 26 September saja.

## Analisis dan Interpretasi

### Harian Kompas

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, ditemukan bahwa Harian Kompas membingkai berita demo 24 September bisa diredakan dengan melakukan dialog. Hal ini terlihat pada bagian sintaksis yang ditonjolkan, seperti pada bagian *lead* dari dua dari tiga edisi yang peneliti teliti.

Kemudian pada latar informasi, Harian Kompas juga memfokuskan mengenai dialog yang harus secepatnya dilakukan dalam mengatasi unjuk rasa yang terjadi karena korban mulai berjatuh dalam unjuk rasa tersebut. Hal ini juga didukung dengan harapan dari Azyumardi Azra dan Mgr Ignatius Suharyo yang dimasukkan Harian Kompas mengenai dibukanya dialog dari pemerintah untuk mendinginkan suasana. Penonjolan pada elemen sintaksis memperlihatkan bahwa wartawan Harian Kompas memahami demo 24 September 2019 dapat diselesaikan dengan melakukan dialog antara pemerintah dan mahasiswa.

Harian Kompas berusaha menjalankan prinsip *salus populi suprema lex* (keselamatan/kesejahteraan rakyat adalah hukum tertinggi) yang merupakan inspirasi dari *tagline* mereka “Amanat Hati Nurani Rakyat”. Hal ini terlihat dari salah foto yang dipakai Harian Kompas dalam edisi 26 September 2019 dimana ditunjukkan salah satu pelajar yang mengikuti demo menyalami aparat yang berjaga. Harian Kompas membingkai berita demo mahasiswa dari sisi *human story* serta penuh dengan nilai kemanusiaan.

Media memang perlu menjalankan satu fungsi ideologi untuk menjaga dan mengontrol nilai-nilai kelompok yang dijalankan serta membentuk pemikiran mereka dalam berita (Eriyanto, 2007, p. 122). Dalam hal ini kelompok dimaksudkan adalah rakyat karena jika dilihat dari faktor yang mempengaruhi pengambilan dalam ruang pemberitaan menurut Shoemaker dan Reese (dalam Susilo, 2000, p. 19) faktor ideologi—dalam hal ini adalah filosofi Harian Kompas yaitu “manusia hakikatnya terpanggil untuk bersama dengan sesama berkarya demi pengembangan diri serta lingkungannya kearah perbaikan yang bersumber pada Tuhan Maha Esa” (Sularto, 2007, p. 65) yang mempengaruhi pemberitaan Harian Kompas.

### The Jakarta Post

The Jakarta Post membingkai demo mahasiswa yang dilakukan terlihat seperti demo pada saat jatuhnya rezim Soeharto. Hal ini terlihat dari pemakaian kata “again” pada judul berita “Students leads the way, again” untuk menggambarkan demo yang dilakukan ini merupakan demo terbesar setelah jatuhnya rezim Soeharto. Selain dari pemilihan kata, The Jakarta Post juga menggunakan foto ribuan mahasiswa yang mengikuti demo 24 September sehingga mendukung bahwa demo ini merupakan demo terbesar sejak demo jatuhnya Soeharto.



The Jakarta Post lahir dari sebuah kolaborasi antara empat media di bawah arahan Menteri Penerangan Ali Moertopo dan politikus Jusuf Wanandi. Inisiasi ini lahir karena Moertopo dan Wanandi kecewa pada bias yang dirasakan pada sumber berita asing. Akhirnya, media ini terbit pertama kali pada tahun 1983. Di bawah pimpinan Susanto Pudjomartono pada tahun 1991, The Jakarta Post menjadi lebih vokal mengenai politik serta mengambil sikap pro-demokrasi seperti Tempo (Tarrent, 2008). Padahal, saat itu Soeharto yang terkenal dengan rezim otoriternya masih memimpin Indonesia.

Hal ini menunjukkan bahwa The Jakarta Post juga turut berperan dalam pergolakan untuk menurunkan Soeharto. Ideologi pro-demokrasi inilah yang menyebabkan The Jakarta Post untuk membingkai berita demo 24 September 2019 terlihat sama seperti demo pada saat rezim Soeharto jatuh.

### **Media Indonesia**

Media Indonesia membingkai berita bahwa demo mahasiswa tidak perlu dilanjutkan karena tuntutan mereka sudah dipenuhi. Hal ini bisa dilihat dari penggunaan kata pada “sudah tidak relevan lagi” yang ditulis melalui kutipan Wiranto. Media Indonesia juga menekankan bahwa demo yang dilakukan bukan merupakan cara yang etis dan terhormat untuk menyampaikan aspirasi yang juga bisa dilihat dari pernyataan Wiranto.

Wiranto memang merupakan narasumber dengan kutipan paling banyak yang dimasukkan Media Indonesia dibandingkan narasumber yang lain. Pemilihan sumber berita dari pihak eksternal—dalam hal ini adalah pemerintah juga mempengaruhi dan menentukan dalam berita yang disajikan, menurut Shoemaker dan Reese (dalam Susilo, 2000, p. 19) Faktor lain yang mendukung pemingkai adalah Wiranto merupakan teman lama Surya Paloh (kompas.com), pemilik Media Indonesia.

Dari pemberitaan demo ini terlihat Media Indonesia sedang melakukan *card stacking*, yaitu teknik propaganda untuk memanipulasi persepsi audiens tentang suatu masalah dengan menekankan satu sisi dengan menindas yang lain (Severin & Tankard, 2005, p. 139). Dalam hal ini masalah yang ditekankan oleh Media Indonesia adalah demonstrasi tidak relevan untuk dilakukan karena pemerintah menunda pengesahan sejumlah RUU. Media Indonesia juga menekankan bahwa aspirasi bisa diberikan lewat jalur yang lebih terhormat dan etis yakni dialog konstruktif ataupun lewat *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi.

### **Simpulan**

Pemingkai berita demo 24 September di Harian Kompas, The Jakarta Post dan Media Indonesia lebih berkaitan dengan isu pemberitaan yang diberitakan (what) lewat demo yang dilakukan. Perbedaan itu ada karena setiap media memiliki ideologi yang menjadi landasan untuk mempublikasikan berita. Hal inilah yang membuat berita tersebut memiliki pandangan atau bingkai mengenai peristiwa tersebut – ada beberapa bagian yang ditonjolkan dalam sebuah teks berita.

Harian Kompas berusaha menjalankan ideologi mereka sesuai dengan filosofis dari Ojong dan Jakob selaku pendiri Harian Kompas, yaitu “Amanat Hati Nurani Rakyat”. Harian Kompas membingkai berita dengan menampilkan sisi humanis yang terlihat pada penggunaan foto dimana salah satu pelajar yang mengikuti demo menyalami aparat yang berjaga. Harian Kompas juga membingkai berita bahwa demo yang terjadi bisa diredakan dengan melakukan dialog. Hal ini bisa dilihat dari lead yang dipakai pada dua edisi Harian Kompas yakni edisi 25 dan 25 September 2019.

Kemudian pada The Jakarta Post, berita dibingkai bahwa demo ini merupakan demo terbesar setelah jatuhnya rezim Soeharto. The Jakarta Post memiliki ideologi media yang pro-demokrasi (Tarrent, 2008) yang membuat media yang terbit pada tahun 1983 ini turut berperan dalam turunnya Soeharto.

Ideologi media bisa membuat berita menjadi tidak netral karena mempengaruhi kerangka referensi yang berhubungan dengan konsepsi atau posisi wartawan dalam membentuk berita (Eriyanto, 2007, p. 123).

Dan pada Media Indonesia, demo yang dilakukan dibingkai bahwa tidak relevan lagi untuk dilakukan karena tuntutan mahasiswa yang sudah dipenuhi. Terlihat Media Indonesia melakukan card stacking lewat pemilihan Wiranto sebagai narasumber. Selain merupakan teman baik dari pemilik Media Indonesia, Surya Paloh, faktor kepentingan dari pemilihan sumber berita yaitu pihak eksternal dalam pemerintah yang diwakili Wiranto juga menjadi faktor pembingkai berita yang dilakukan Media Indonesia.

## Daftar Referensi

- Aljazeera. *Indonesia protests: Hundreds hurt in student-police clashes*. (2019). Retrieved February 16, 2020 from <https://www.aljazeera.com/news/2019/09/indonesia-protests-80-students-hurt-police-clashes-190925044211780.html>
- Barus, S.W. (2010). *Petunjuk Teknis Menulis Berita*. Jakarta: Erlangga Chaer, Abdul. (2010). Bahasa Jurnalistik. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Change.org. *Indonesia Bersih, Presiden Tolak Revisi UU KPK!*. (n.d). Retrieved February 20, 2020 from <https://www.change.org/p/jokowi-kami-tolak-revisi-uu-kpk-reformasidikorupsi>
- Change.org. *JANGAN BUNUH KPK, HENTIKAN REVISI KPK*. (n.d). Retrieved February 20, 2020 from <https://www.change.org/p/dpr-ri-janganbunuhkpk-hentikan-revisi-uu-kpk-pdi-perjuangan-golkar5-nasdem-fraksigolkar-fraksi-nasdem>
- CNN Indonesia. *Aksi Mahasiswa, Ketukan Jari di Medsos Berujung Jadi Aksi*. (2019). Retrieved February 12, 2020 from <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20190927144155-185-434679/aksi-mahasiswa-ketukan-jari-di-medsos-berujung-jadi-aksi>
- Eriyanto. (2007). *Analisis Framing Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media*. Yogyakarta; LKis.
- Good News from Indonesia. *Drone Emprit Buatan Anak Bangsa*. (2019). Retrieved February 12, 2020 from <https://www.goodnewsfromindonesia.id/2019/05/22/drone-emprit-buatan-anak-bangsa>

Harian Kompas edisi 25 September 2019.

Harian Kompas edisi 26 September 2019.

Harian Kompas edisi 27 September 2019.

Pinter Politik. *Shifting Paradigm of Kompas Gramedia?*. (2018). Retrieved February 5, 2020 from <https://www.pinterpolitik.com/shifting-paradigm-kompas-gramedia-2/>